

**PEALAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DI DESA EMBALA KECAMATAN PARINDU  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014**

**Oleh:  
KRISTIANUS  
NIM. E42010013**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015.

*E-mail : [kristianus.mumasaju12@gmail.com](mailto:kristianus.mumasaju12@gmail.com)*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala tahun 2014. Penyusunan rencana kerja pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan perencanaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala tahun 2014. Teori utama yang digunakan adalah mengenai langkah-langkah perencanaan pembangunan yang *bottom-up*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pada penelusuran masalah pembangunan belum menemukan sasaran yang tepat. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman unsur-unsur perencanaan tentang penyusunan rencana kerja pembangunan desa yang berdasarkan langkah-langkah perencanaan *bottom-up*.

Kata-kata kunci: perencanaan, pembangunan, desa, *bottom-up*

**IMPLEMENTATION PROCESS OF ORGANIZATION WORK PLAN  
DEVELOPMENT IN THE EMBALA VILLAGE DISTRICT OF PARINDU  
OF SANGGAU REGENCY IN 2014**

**By:  
KRISTIANUS  
NIM. E42010013**

*Government Science Program Faculty of Social Science and Political Science,  
colaborating Tanjungpura University Pontianak with Kalimantan Barat Province's  
Government, 2015. E-mail : [kristianus.munasoju12@gmail.com](mailto:kristianus.munasoju12@gmail.com)*

***Abstract***

*This research discusses the implementation process of organization work plan development in the Embala Village in 2014. The planning of rural development work carried out by the legislation in order to create plans that meet the needs of society. The purpose of this study was to determine how the implementation of the work plan development process in Embala village in 2014. The main theory used is about bottom-up development planning steps. This study used qualitative methods of data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the work plan development process in the village Embala is not optimal. That is because in search of development issues have yet to find the right target. This research has implications for understanding the elements of a work plan planner rural development measures based bottom-up planning.*

*Keywords: planning, development, rural, bottom-up*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 06 Thn 2014). Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan desa. Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014, Pasal 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa agar masalah pembangunan di desa dapat terserap serta

pemanfaatan potensi desa dapat di maksimalkan.

Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan desa akan menghasilkan dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes). Sebagai penerapan dari sila ke-4 Pancasila, maka dalam perencanaan pembangunan desa ditempuh melalui jalan musyawarah yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. RKP-Desa merupakan input yang diperlukan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah setelah melalui musyawarah ditingkat kecamatan. Dalam penyusunan RKP-Desa diharapkan adanya prakarsa-prakarsa yang muncul dari masyarakat, karena perencanaan pembangunan di tingkat desa merupakan ujung tombak dari perencanaan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Desa Embala sebagai salah satu unit pemerintahan yang berada dibawah pemerintahan NKRI wajib menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa). Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan tersebut diindikasikan

dengan tidak terserap dengan maksimal mengenai permasalahan pembangunan desa serta pemanfaatan potensi yang belum optimal. Selain adanya indikasi masalah, fakta dilapangan menunjukkan sebagian data-data desa yang digunakan sebagai bahan perencanaan tidak lengkap serta tidak diperbaharui (*tidak up to date*), adanya program pembangunan yang tidak tepat sasaran, serta sebagian perwakilan RT tidak hadir dalam musrenbang desa.

Apabila ditimbang dari paradigma pembangunan di era ini yang lebih menitikberatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam perencanaan pembangunan desa harus menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif yang berasal dari bawah (*bottom-up*). Oleh karena itu, beranjak dari permasalahan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Desa Embala penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan penyusunan rencana kerja pembangunan desa

berdasarkan paradigma pembangunan partisipatif.

## **2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada judul sebelumnya, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan langkah penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, penetapan langkah rinci, dan merancang anggaran dalam penyusunan rencana kerja pembangunan (RKP) di Desa Embala Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Tahun 2014?”

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Embala tahun 2014 berdasarkan langkah-langkah: penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, penetapan langkah rinci, dan merancang anggaran.

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah menambah

wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan seluruh pembaca, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP-Desa Embala, baik itu tim penyusun RKP Desa, masyarakat desa, pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintahan daerah yang memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan RKP-Desa.

## **B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI**

### **1. Kerangka teori**

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalian gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dasar hukum dalam perencanaan pembangunan desa antara lain UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 menyatakan perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Perencanaan desa merupakan perencanaan lahir dari bawah (*bottom-up*) bukan lahir dari atas (*top-down*) atau pemerintah daerah.

Penyusunan rencana pembangunan desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perencanaan itu sendiri. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyusunan RKP Desa Embala tahun 2014, maka peneliti menggunakan teori mengenai langkah-langkah perencanaan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Alexander Abe (2001:100) yang meliputi langkah-langkah:

a. **Penyelidikan** merupakan sebuah proses untuk mengetahui, mengenali, dan mengumpulkan

persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.

b. **Perumusan masalah** merupakan proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat.

c. Identifikasi **daya dukung** merupakan proses analisis keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan

d. **Perumusan tujuan** merupakan proses merancang kondisi yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan hasil analisis masalah dan potensi desa.

e. **Penetapan langkah rinci** merupakan proses menyusun apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

f. **Merancang anggaran** merupakan suatu usaha untuk menghitung alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif agar data yang diperoleh kompleks dan pemaparannya lebih jelas. Pendekatan kualitatif adalah suatu

pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan dengan benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori, Djama'an dan Aan Komariah, 2012:25). Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan dan data yang holistik atau menyeluruh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan lebih jelas. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Lokasi penelitian bertempat di Desa Embala Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Adapun yang menjadi subjek Penelitian ialah Tim Penyusun RKP Desa Embala tahun 2014, Lembaga Kemasyarakatan

Desa Embala dan Masyarakat Desa Embala.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Dalam pembangunan desa itu sendiri terdapat berbagai usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan. Dengan adanya Perencanaan Pembangunan Desa yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa Embala. Untuk mewujudkan suatu penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang baik maka mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007

Tentang Perencanaan Pembangunan Desa didalamnya mengisyaratkan agar perencanaan pembangunan desa dilandaskan pada prinsip pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan dan cermat, proses berulang serta penggalian informasi.

Permasalahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa terjadi karena pelaksanaannya yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah dalam sebuah perencanaan di dalam instansi publik, yang diarahkan pada perencanaan pembangunan partisipatif yang berasal dari bawah (*bottom-up*). Untuk itu, dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa seharusnya digunakan suatu model atau kerangka kerja tertentu untuk memudahkan para pelaku perencana.

Untuk menganalisis pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja pembangunan desa Embala tahu 2014 maka peneliti menggunakan teori Alexander Abe tentang langkah-langkah perencanaan yang *bottom-up* yang

terdiri dari langkah-langkah penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, penetapan langkah rinci, dan merancang anggaran.

### 1. Penyelidikan

Langkah pertama dalam proses perencanaan pembangunan yaitu menyelidiki, yaitu sebuah proses untuk mengetahui, mengenali, dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat (Abe 2001:100). Perencanaan yang menyusun program-program pembangunan di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat (*community need analysis*) agar benar-benar dapat memenuhi kebutuhan, dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of wants*) yang bersifat sesaat. Menurut Djohani ada banyak metode dalam pengkajian desa secara partisipatif, namun metode yang utama yang paling umum digunakan yakni:

1. Kajian dokumen
2. Lokakarya (*workshop*)
3. Pengamatan lapangan

### **1.1 Kajian dokumen**

Kajian dokumen yaitu kajian data yang sudah pernah disusun sebelumnya. Apabila data masih relevan, kajian desa dapat dilakukan dengan melakukan kajian dokumen yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa tim penyusun RKP Desa Embala tahun 2014 juga melakukan kajian dokumen/data sekunder. Dokumen yang dikaji antara lain sketsa desa/peta desa, RPJM Desa, Profil Desa dan data monografi desa. Namun dalam hal penggunaan data Tim Penyusun RKP Desa Embala masih belum optimal dikarenakan ketersediaan data sangat terbatas. Data yang lemah dikarenakan kurangnya data yang dimiliki pemerintah desa Embala, serta kurangnya penggalian informasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa. Kurangnya data ini juga dikarenakan data-data yang ada tidak dikelola dengan baik. Selain itu juga, koordinasi antara Pemerintah Desa Embala dengan instansi pendidikan dan instansi pelayanan kesehatan di Desa Embala masih belum terjalin dengan baik.

### **1.2 Lokakarya (*workshop*)**

Lokakarya ini merupakan pilihan cara untuk menemukan permasalahan krusial (penting) yang perlu dibawa ke Musrenbang desa. Dalam penyusunan RKP-Desa Embala tidak diadakan lokakarya sebelum dilaksanakannya musrenbang desa. Hal ini dikarenakan selama ini masih adanya sikap apatisme warga RT, sehingga Ketua RT enggan untuk mengadakan musyawarah RT. Sikap apatisme warga RT berimbas pada ketinggalan informasi, sehingga sebagian besar tidak mengetahui adanya musrenbang desa.

### **1.3 Pengamatan Lapangan**

Untuk mengecek/verifikasi dan memperbaharui (*up-date*) data/informasi keadaan desa yang penting untuk menyusun masalah prioritas dan program/kegiatan desa, seringkali dilakukan pengamatan lapangan (observasi) sehingga kondisi riil diketahui. Dari hasil wawancara diketahui dalam Penyusunan RKP Desa tidak ada peninjauan langsung dilapangan. Hal ini dikarenakan pertimbangan biaya, dan dianggap merupakan suatu

pemborosan. Selain itu juga menurut sebagian pelaku perencana bahwa observasi/pengamatan lapangan tidak dilakukan dengan pertimbangan bahwa pihak yang mempunyai tugas mengkaji desa sudah cukup memahami keadaan dan kondisi desa.

## **2. Perumusan masalah**

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari tahap penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Dari hasil penelitian, diketahui identifikasi masalah dan potensi desa dilakukan oleh tim dalam dua tahap. Tahap pertama adalah membuat rancangan identifikasi masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Tim Penyusun RKP pada saat pengkajian kondisi desa. Tahap kedua adalah identifikasi masalah dengan menjangkau masalah dari peserta musrenbang desa sebagai perwakilan dari masyarakat. Setelah dilakukannya penjangkauan masalah melalui forum musrenbang desa, maka akan diperoleh identifikasi masalah secara utuh, kemudian akan

dipilah-pilah berdasarkan bidang-bidang pembangunan yang ada dalam RPJM Desa.

## **3. Identifikasi Daya Dukung**

Dalam masalah ini daya dukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa identifikasi daya dukung dilaksanakan pada saat musrenbang desa bersama perwakilan masyarakat. Identifikasi daya dukung dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, sehingga memudahkan untuk menentukan ketersediaan potensi dalam penyelesaian masalah. Di Desa Embala sendiri banyak tersedia daya dukung, namun daya dukung tersebut tidak akan berfungsi apabila tidak adanya daya dukung kongkrit (uang). Daya dukung yang tidak kalah penting juga adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri baik itu berupa swadaya dana maupun gotong-royong, yang sampai saat ini belum maksimal.

#### 4. Rumusan tujuan

Salah satu proses perencanaan pembangunan adalah menentukan dan menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan. Bahkan sebelum memulai perencanaan perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah kondisi yang dicapai, sesuatu keadaan diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Untuk menghasilkan program pembangunan yang efektif, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. **Transparan**, yaitu bahwa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat. Ini dapat dilihat dalam tahap-tahap musrenbang desa, dalam proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh komponen masyarakat meskipun tidak secara langsung. Pengambilan keputusan dilakukan melalui perwakilan saja, baik itu perwakilan dari RT, dusun, maupun lembaga kemasyarakatan desa.
2. **Responsif**, bahwa program pembangunan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena rancangan dari pihak-pihak tertentu saja. Ini dilihat dari pelaksanaan musrenbang bahwa ada usaha penjaringan masalah oleh Tim Penyusun RKP Desa Embala. dalam pelaksanaan musrenbang desa, peserta libatkan dalam kegiatan identifikasi masalah yang ada di Desa Embala.
3. **Partisipatif**, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat Desa Embala melalui perwakilan masyarakat di tingkat RT dan dusun serta dari berbagai komponen seperti dari LPMD/PNPM MD, PKK, dan lembaga adat dalam proses musrenbang desa yang secara otomatis masyarakat Desa

Embala akan mempunyai peluang dalam memperhatikan dan mengangkat isu-isu yang berkembang pada masyarakat Desa Embala itu sendiri. Meskipun dalam absensi musrenbang Desa Embala tahun 2014 masih terdapat 7 orang ketua RT yang tidak hadir, namun jumlah yang hadir masih melebihi yang tidak hadir, yaitu berjumlah 16 orang.

4. Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilaksanakannya musrenbang serta isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Embala diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Desa Embala, diadakannya penjangkaran masalah dalam musrenbang desa, melibatkan masyarakat melalui perwakilan RT dan dusun serta lembaga kemasyarakatan desa sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Penetapan langkah rinci**

Penetapan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak. Berdasarkan dokumen musrenbang desa tahun 2014 bahwa perencanaan masih bersifat usulan. Dalam usulan tersebut belum mempertimbangkan sumber daya keuangan, karena sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan direalisasikan setelah dilakukannya musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. Meskipun demikian adanya, didalam Rencana Kerja Pembangunan Desa Embala sudah memuat rincian berupa jenis kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi, sasaran, target, sifat (baru, lanjutan, rehabilitasi, perluasan), waktu pelaksanaan, biaya (jumlah dan sumber) dan penanggungjawab.

## **6. Merancang anggaran**

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen harus mengetahui dan mempertimbangkan modal atau sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya. Dalam dokumen musrenbang desa, rancangan anggaran terdapat dalam dokumen dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKP Desa), dimana dalam dokumen tersebut terdapat usulan rencana kegiatan pembangunan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok kegiatan, yaitu kelompok kegiatan PKK serta ibu dan anak, penguatan kelembagaan, usaha ekonomi produktif (UEP), dan pembangunan sarana dan prasarana. Pembiayaan usulan rencana kegiatan pembangunan tersebut dapat berasal dari swadaya masyarakat, ADD, pihak ketiga, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupu APBN.

## **D. SIMPULAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyusun dalam pelaksanaan penyusunan RKP-Desa belum optimal. Proses penyelidikan

dilakukan melalui kajian dokumen/data sekunder, sedangkan lokakarya pra-musrenbang tingkat RT/dusun dan pengamatan lapangan tidak dilakukan. Dalam kajian dokumen penggunaan data masih lemah terkendala karena sebageian data yang diperlukan tidak tersedia.

2. Perumusan masalah dalam rangka penyusunan RKP Desa Embala sudah baik, dan dilakukann dalam 2 tahap, yaitu: tahap perumusan masalah yang dilakukan oleh internal Tim Penyusun RKP Desa dan tahap perumusan masalah bersama masyarakat dalam forum musrenbang desa.

3. Dalam identifikasi Daya dukung belum optimal karena dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang tidak ada, sebab hasil dari musrenbang pada dasarnya merupakan usulan kegiatan yang belum ada ralisasi dananya, sedangkan dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) ada, namun daya dukung ini tidak dapat berfungsi karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa

- dukungan konkrit dan nyata sudah ada dahulu.
4. Proses perumusan tujuan dalam pelaksanaan penyusunan RKP Desa Embala tahun 2014 sudah baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel.
  5. Penetapan langkah-langkah rinci sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan penyusunan RKP desa Embala tahun 2014 yaitu dalam bentuk rincian usulan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah memuat kegiatan, sasaran, penanggungjawab, dan waktu pelaksanaan. Penetapan langkah-langkah rinci hanya masih bersifat rancangan saja, kecuali untuk kegiatan yang pembiayaannya dilakukan oleh dapat dikendalikan ditingkat desa.
  6. Proses merancang anggaran sudah dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa Embala tahun 2014, yang didalam dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) terdapat pembiayaan (nominal dan sumber) untuk

setiap kegiatan pembangunan. Namun, merancang anggaran disini masih bersifat perkiraan saja, karena sebagian pembiayaan pembangunan desa berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Merancang anggaran yang sesungguhnya hanya khusus pada kegiatan yang pembiayaannya berasal dari ADD.

## **2. Keterbatasan Penelitian**

Kurangnya pemahaman informan tentang perencanaan pembangunan menjadi kendala bagi peneliti dalam menggali informasi secara dalam. Keterbatasan lainnya dari penulis sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali dilakukan oleh penulis sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

## **E. APRESIASI**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Landak, khususnya kepada Pemerintah Desa Embala yang telah mengizinkan serta membantu memberikan informasi dan data dalam proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Buku

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, Dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- Djohani, Rianingsih (FPPM) . 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: The Asia Foundation.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Krina P, Loila Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Moeljarto, T. 1995. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis konsep, Arah, dan Strategi*. Jogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, Ernan. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Safi'i, HM. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Satori, Djamm'an dan Aan Komriah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan*

- Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read Action and Development.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. The World Bank.
- Sutopo, H B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: CV MandarMaju.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrooz.
- Dewi Rostyaningsih Suwandi. 2012. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Ulil Amri. 2011. *Peran Tim Posko P3MD dalam Merumuskan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2011*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

#### **Rujukan Regulasi**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **Rujukan Skripsi**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak. Kode Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KRISTIANUS  
NIM / Periode lulus : E42010013 / 2014  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address /HP : [kristianus.munasojul2@gmail.com](mailto:kristianus.munasojul2@gmail.com) / 085390713247

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DI DESA EMBALA KECAMATAN  
PARINDU KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2014**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 25 Februari 2015

  
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA

  
(Kristianus)